

KONTRIBUSI PANGAN LOKAL DALAM SISTEM KETAHANAN PANGAN NASIONAL

J. E. LOUHENAPESY

Guru Besar Fakultas Pertanian UNPATTI

Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku

PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar kehidupan manusia dan ketahanan pangan adalah benteng terakhir ketahanan nasional. Sehingga dapat dikatakan boleh saja kita menunda pembangunan kecuali pembangunan ketahanan pangan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan-bahan tambahan sebagai kelengkapan bahan baku pangan yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan / atau pembuatan makanan dan minuman.

Swasembada pangan mencakup pengertian produksi pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan suatu daerah (domestik). Diversifikasi pangan pada awalnya mencakup pengertian panganeka ragam bahan pangan demi pemenuhan bahan pangan secara nasional, tetapi dengan berkembangnya konsep ketahanan pangan maka diversifikasi pangan lebih mengarah pada panganeka ragam konsumsi pangan agar mencapai tingkat gizi rumah tangga cukup dan berimbang.

Ketahanan pangan :

Menurut World Bank 1986 : ketika orang pada setiap saat memiliki aksesibilitas secara fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka agar dapat produktif dan sehat.. Menurut International Conference in Nutrition (FAO / WHO, 1992) : Akses setiap rumah tangga atau individu untuk memperoleh pangan pada setiap waktu untuk keperluan hidup sehat.. Menurut World Food Summit 1996 : memperluas definisi FAO dengan persyaratan pengembangan pangan sesuai nilai atau budaya setempat.. Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1996 : kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Beberapa kesepakatan bersama Gubernur / Ketua Dewan Ketahanan Propinsi pada konverensi Dewan Ketahanan Pangan 2004 :

- Menjaga ketersediaan pangan melalui upaya-upaya peningkatan produksi dan produktivitas pangan nabati dan hewani sesuai potensi wilayah masing-masing.
- Melakukan upaya-upaya diversifikasi konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan berimbang serta aman, sesuai kondisi dan situasi daerah dengan mengutamakan sumber pangan lokal untuk mencegah ketergantungan terhadap satu jenis pangan tertentu.

Sesuai uraian-uraian diatas jelas bahwa telah disadari peranan pangan daerah atau pangan local dalam memantapkan ketahanan pangan.

SISTEM KETAHANAN PANGAN.

I. Kerangka Sistem

Aspek-aspek penting dalam ketahanan pangan adalah :

- Tersedia pangan : ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, berasal dari pangan lokal, impor maupun stok masyarakat.
- Distribusi stabil :pangan tersedia bagi rumah tangga sepanjang waktu dan dimana saja.

- Keterjangkauan : kemampuan akses fisik dan ekonomi terhadap sumber pangan secara sosial dan geografis.
- Konsumsi pangan : penganekaragaman konsumsi pangan, bergizi seimbang, sehat dan aman.
- Kecukupan pangan : pangan cukup secara kuantitas maupun kualitas untuk kebutuhan rumah tangga.

Berdasarkan aspek-aspek diatas maka sistem ketahanan pangan dibagi dalam tiga subsistem yaitu :

- 1) Subsistem ketersediaan pangan : berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dan rumah tangga dari segi kecukupannya baik kuantitas maupun kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari produksi lokal, pengelolaan cadangan pangan dan impor. Dengan kondisi ekonomi yang relative lemah maka kemauan untuk menjadi bangsa yang mandiri dibidang pangan harus terus diupayakan. Karena itu daerah (pemerintah dan masyarakat) harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan pangannya dari produksi di daerah sendiri. Impor pangan dari luar daerah adalah alternatif apabila kondisi pangan pada lokasi-lokasi di daerah sudah tidak dapat dipenuhi. Oleh karena itu sistem lumbung pangan masyarakat spesifik lokasi perlu dikembangkan di daerah (Propinsi / Kabupaten).
- 2) Subsistem distribusi pangan : berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat yang menjamin seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu. Bervariasinya kemampuan produksi pangan antar wilayah dan antar musim membutuhkan kecermatan dalam mengelola sistem distribusi sehingga pangan dapat tersedia sepanjang waktu di setiap wilayah. Sebagai propinsi kepulauan penyediaan sarana-prasarana distribusi baik transportasi darat, laut maupun pergudangan (lumbung) dan lembaga pemasaran perlu mendapat perhatian dari pemerintah demi efisiensi biaya distribusi, agar tidak membebani masyarakat konsumen secara berlebihan tetapi disisi lain tidak juga membebani petani produsen maupun pedagang. Campur tangan pemerintah dapat berupa pengadaan lumbung-lumbung pangan, peraturan-peraturan daerah seperti biaya-biaya retribusi dan pungutan-pungutan lainnya yang dapat mengakibatkan biaya tinggi sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat pembeli maupun pedagang.
- 3) Subsistem konsumsi : Berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan termasuk kehalalan, selain itu juga efisiensi pemanfaatan untuk mencegah pemborosan.

Subsistem konsumsi juga mengarahkan pada kualitas makan yaitu pemanfaatan pangan dalam tubuh dapat optimal. Penting pola konsumsi beragam dengan gizi seimbang mencakup energi, protein, vitamin dan mineral, pemeliharaan sanitasi serta pencegahan penyakit infeksi dalam lingkungan rumah tangga. Hal ini dilakukan melalui pendidikan dan penyadaran masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan pengertian dan kemauan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam pengelolaan konsumsi.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan Rumah Tangga

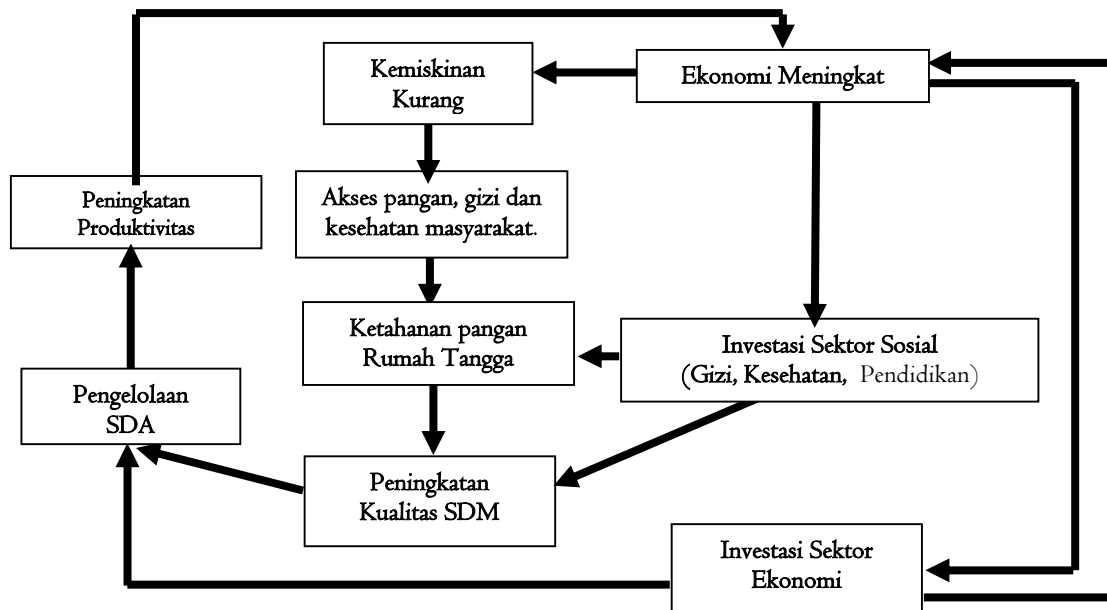
Undang-Undang No. 7 tahun 1996 mengisyaratkan bahwa ketahanan pangan adalah terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga. Ketahanan pangan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh akses rumah tangga terhadap pangan, kondisi gizi dan kesehatan dimana hal ini sangat dipengaruhi oleh ekonomi rumah tangga.

Oleh karena itu semua factor yang dapat mempengaruhi peningkatan ekonomi keluarga akan mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga.

Disini dapat dikemukakan alur pikir dalam suatu pelaksanaan proses ketahanan pangan adalah :

- Bagaimana produksi pangan, apakah lokal, wilayah atau nasional.
- Bagaimana distribusinya dapat meningkatkan keterjangkauan
- Apakah makanan cukup tersedia bagi Rumah Tangga.
- Apakah konsumsi Rumah Tangga dengan status gizi yang cukup serta aman.

- Apakah kondisi pangan rumah tangga dapat menyiapkan masyarakat yang sehat, berpendidikan dan produktif yang dengan sendirinya dapat menyediakan pangannya sendiri dengan status gizi yang baik dan aman.



Gambar 1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Rumah Tangga

3. Paradigma Pembangunan Ketahanan Pangan

Pada masa lalu sebelum keluarnya UU No. 7 tahun 1996 tentang “Pangan” paradigma pembangunan ketahanan pangan melalui pendekatan pengembangan secara makro (malah nasional), pendekatan manajemen pembangunan secara sentralistik, pelaku utama pembangunan adalah pemerintah, fokus pengembangan komoditas adalah padi (beras), keterjangkauan rumah tangga atas pangan melalui penyediaan pangan murah, perilaku keluarga sadar akan kecukupan pangan.

Melalui UU No. 7 tahun 1996 tentang “Pangan”, PP No. 68 tahun 2002 tentang “Ketahanan Pangan”, PP 28 tahun 2004 tentang “Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan”. Kesepakatan bersama Gubernur / Ketua Dewan Ketahanan Pangan Propinsi mengenai “Perwujudan Ketahanan Pangan Wilayah dan Nasional” dan kebijakan umum Ketahanan Pangan 2006 – 2009, maka paradigma pembangunan ketahanan pangan berubah dimana :

- Pendekatan pengembangannya ke rumah tangga,
- Pendekatan manajemen pembangunannya desentralistik,
- Pelaku utamanya bukan pemerintah tetapi masyarakat,
- Tidak lagi fokus ke padi (beras) tetapi pangan dalam arti luas dengan mengutamakan potensi lokal,
- Penyediaan pangan murah harus ditinggalkan tetapi bagaimana masyarakat bisa menyediakan atau mendapatkan pangannya sendiri dan
- Keluarga lebih sadar gizi.

Dengan memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat yang lemah apabila paradigma ini mau diterapkan maka perlu ada campur tangan yang kuat dari pemerintah baik sebagai inisiator, fasilitator maupun regulator (ini telah digarisikan dalam UU No. 32 / 2004 tentang otonomi daerah) untuk lebih meningkatkan peran masyarakat dalam melakukan pembangunan ketahanan pangan.

BERAS DALAM SISTEM KETAHANAN PANGAN NASIONAL

Beras sudah mengambil peranan penting dalam sistem ketahanan pangan nasional walaupun sudah menjadi silang pendapat sejak lama. Syamsu Sadjat dalam peluncuran bukunya berjudul “Memberagamkan Pangan dalam Konteks Agropolitik Negeri Agraris Indonesia” mengatakan bahwa agropolitik pemerintah tidak berubah sejak zaman Belanda sampai sekarang, dimana setiap kali membicarakan Ketahanan Pangan selalu memasalahkan beras (Kompas, 26 Juni 2006). Kelihatannya pendapat ini dapat dibenarkan yang nyata dalam program pengembangan pangan di Indonesia sampai saat ini.

Pada dekade limapuluhan sudah muncul kekhawatiran akan pangan dunia. Sesuai teori Robert Malthus yang menyatakan bahwa “bahan makanan akan bertambah sesuai deret hitung dan penduduk akan bertambah sesuai deret ukur” mengakibatkan penduduk dunia akan kekurangan bahan makanan. Serta teori “*the limit of growth*” yang melihat bahwa “eksploitasi alam akan mencapai titik paling kritis” termasuk dalamnya produksi pangan (Sumodiningrat 2002). Awal tahun enam puluhan muncul Teknologi Revolusi Hijau yang lahir di Meksiko oleh penemuan Borlaugh. Paradigma Borlaugh pada pokoknya menyatakan bahwa hasil pertanian akan dapat dipertahankan dan ditingkatkan hanya dengan memasukan luar yang tinggi yaitu dengan menggunakan bahan agrokimia (pupuk dan obat-obatan).

Indonesia menerima dan melaksanakan konsep revolusi hijau mulai akhir tahun enam puluhan (1967). Konsep ini diterapkan secara merata diseluruh Indonesia tetapi sayangnya hanya diterapkan untuk komoditi padi sedangkan komoditi pangan lainnya kurang mendapat sentuhan. Konsep ini kelihatannya cukup berhasil dengan dideklarasikannya pencapaian swasembada pangan oleh Presiden pada tahun 1984. Tetapi penekanan terhadap pengembangan padi memberikan pengaruh negatif yaitu masyarakat mulai meninggalkan konsumsi pangan lokal dan beralih keberas. Hal ini terlihat dalam data konsumsi pangan di Indonesia sebagai berikut :

Tabel I. Konsumsi Beras dan Beberapa Bahan Pangan Bukan Beras dan Persen Konsumsi Bukan Beras Terhadap beras Antara Tahun 1968 – 1985 di Indonesia.

Konsumsi (kg / kapita / Tahun)	1968	1985	Perubahan % / tahun
Beras	96,47	143,16	+ 2,85
Jagung	31,18	22,68	- 1,60
Umbi-umbian	83,67	70,77	- 0,91
Sagu	4,20	0,78	- 4,8

Sumber : Diolah dari Statistik Pertanian (NBM di Indonesia) 1988.

Dalam perjalanan dari tahun 1984 muncul keraguan terhadap swasembada pangan nasional (swasembada beras) dan muncul pendapat-pendapat seperti :

1. Affandi (Menteri Pertanian) pada 1986 menyatakan bahwa sepatutnya jangan berpikir kearah terbentuk pola konsumsi nasional karena tidak akan tercapai tetapi sebaliknya pola konsumsi lokal ;
2. Baharsyah (1988) menyatakan bahwa dalam masa depan diharapkan konsumsi beras dapat dikurangi dan konsumsi pangan local ditingkatkan demi pencapaian swasembada pangan ;
3. Sumodiningrat (2001) bahwa keprihatinan terhadap swasembada beras mulai muncul 1990 dimana Indonesia kembali mengimpor beras, bahkan sampai saat ini Indonesia masih mengimpor beras.
4. Pada keragaman ketahanan pangan nasional tahun 2000 – 2005 pertumbuhan produksi beras hanya 0,82 % dimana sangat kecil bila dibandingkan laju pertumbuhan kebutuhan akibat jumlah penduduk yang besar (219,3 juta jiwa) dan terus bertambah (1,25%/tahun), disisi lain pengembangan produksi beras juga dihadapkan dengan kendala antara lain :
 - Berlanjutnya konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian.
 - Menurun kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan.

- Terjadi kejenuhan teknologi.
- Penyediaan air irigasi makin terbatas akibat rusaknya lingkungan serta rusaknya prasarana pengairan.
- Kondisi iklim yang tak menentu, dan lain-lain.

Dengan demikian untuk kembali mencapai swasembada beras seperti tahun 1984 sudah tidaklah mungkin, maka kebutuhan akan impor beras terus meningkat yang akan menimbulkan kerentanan yang dapat berimplikasi negatif terhadap kedaulatan nasional. Oleh karena itu perhatian terhadap peranan pangan lokal harus ditingkatkan untuk menunjang pencapaian sistem ketahanan pangan nasional.

KONTRIBUSI PANGAN LOKAL DALAM SISTEM KETAHANAN PANGAN NASIONAL

Kenyataan bahwa peranan beras untuk mencapai ketahanan pangan nasional sudah tidak mungkin dan kesadaran peranan pangan lokal makin tinggi baik secara internasional maupun nasional. Walaupun demikian secara nasional perhatian konkrit dalam kebijakan pengembangan lokal masih sangat rendah. Dalam kegiatan operasional ketahanan pangan 2006 – 2009 hanya 5 komoditas pangan yaitu padi, jagung, kedelai tebu, dan daging sapi yang ada dalam kebijakan. Dengan demikian apabila pangan lokal mau dikembangkan maka pemerintah daerah harus mengambil peran yang nyata demi mengimplimentasikan kesepakatan Gubernur sebagai Ketua Dewan ketahanan Pangan Propinsi dalam Konprensi Ketahanan Pangan 2004.

Peningkatan peran pangan lokal bukanlah suatu pekerjaan yang mudah karena harus diakui bahwa peran beras sudah cukup jauh masuk ke desa dengan berbagai kebijakan pemerintah sebagaimana telah diuraikan terdahulu, yang masih terus dilakukan sampai saat ini misalnya distribusi "beras raskin". Oleh karena itu kalau pangan lokal mau ambil peran dalam sistem Ketahanan Pangan Nasional maka perlu pengkajian yang mendalam dari berbagai aspek agar pengembangan pangan lokal betul terarah dan mantap, yang dengannya pangan lokal dapat memberikan kontribusi yang nyata.

Beberapa pertanyaan dasar untuk mendudukan kontribusi pangan lokal dalam sistem ketahanan pangan adalah kondisi saat ini dari beberapa aspek :

1. Bagaimana kondisi ketahanan pangan wilayah
2. Bagaimana kondisi ketersediaan pangan lokal baik jenis maupun potensinya.
3. Bagaimana pola distribusi pangan lokal
4. Bagaimana tingkat konsumsi pangan lokal

I. Kondisi Ketahanan Pangan

Berdasarkan perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) 2004 ternyata kecukupan energi pada tingkat ketersediaan di Propinsi Maluku baru mencapai 2462 Kkal/kap/hari dibawah angka standar nasional 2550 Kkal/kap/hari, potensi sebesar 80.64 gr/kap/hari dan lemak 48.03 gr/kap/hari, lihat tabel 2.

Dari sisi kalori, padi-padian (beras) menyumbang 1288 Kkal/kap/hari (52.30%) dan makanan berpati (termasuk umbi-umbian dan sagu) hanya 432 Kkal/kap/hari (17.5%). Padahal produksi beras di Maluku baru 33.020 ton (21.5%) dan sisanya 143.728 ton (78.5%) diimpor dari luar Maluku. Kalau makanan berpati sebagai komoditas lokal harus mengganti beras berarti sejumlah 964.07 Kkal/kapita/hari harus diisi oleh makanan berpati. Dari tersedianya protein ternyata padi-padian menyumbang 31.81 gr/kap/hari (39.4%) dan yang terbesar ikan yaitu 41.64 gr/kap/hari (51.6%) sedangkan makanan berpati 1.96 gr/kap/hari (2.4%) dan daging 1.49 gr/kap/hari (1.8%). Untuk mengatasi 78.5 % beras impor yang menyumbang 23.81 gr/kap/hari maka selain disumbang oleh makanan berpati harus juga disumbang oleh daging, ikan dan telur.

Tabel 2. Banyaknya KH (Kalori), Protein dan Lemak yang tersedia untuk Dikonsumsi di Propinsi Maluku

No.	Kelompok Bahan Makanan	Kalori Kkl/kap/hari		Protein gr/kap/hari		Lemak gr/kap/hari	
		Jmlh	%	Jmlh	%	Jumlah	%
I	Padi-Padian	1288	52.3	31.81	39.4	5.44	11.3
II	Makanan Berpati	432	17.5	1.96	2.4	0.69	1.4
III	Gula	130	5.3	0.04	0.0	0.13	0.3
IV	Buah / Biji Berminyak	85	3.5	3.41	3.0	7.09	14.8
V	Buah-Buahan	21	0.9	0.27	0.3	0.13	0.3
VI	Sayuran	5	0.2	0.3	0.4	0.1	0.2
VII	Daging	22	0.9	1.49	1.8	1.7	3.5
VIII	Telur	8	0.3	0.56	0.7	0.55	1.1
IX	Susu	1	0.0	0.04	0.0	0.04	0.1
X	Ikan	232	9.4	41.64	51.6	4.94	10.3
XI	Minyak / Lemak :						
	➤ Nabati	233	9.5	0.12	0.1	26.7	55.6
	➤ Hewani	5	0.2	0	0.0	0.52	1.1
Jumlah		2462	100	80.64	100	48.03	100

Dari sisi skor Pola Pangan Harapan Maluku (PPH), baru mencapai 63.9 masih rendah dari skor maksimum 100. Yang belum mencapai skor maksimum adalah sayur dan buah baru 5.2 dari skor maksimum 30, pangan hewani 21.0 dari skor maksimum 24.0, minyak dan lemak 4.7 dari skor maksimum 5.0 dan kacang-kacangan 2.0 dari skor maksimum 10 (Tabel 3)

Tabel 3. Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2004

No.	Kelompok Pangan	Kalori	%	% AKG	Bobot	Skor Aktual	Skor AKG	Skor PPH	Skor Maks
1	Padi-padian	1288	52.4	51.5	0.5	26.2	25.8	25.0	25.0
2	Umbi-umbian	432	17.6	17.3	0.5	8.8	8.6	2.5	2.5
3	Pangan Hewani	263	10.7	10.5	2.0	21.4	21.0	<u>21.0</u>	24.0
4	Minyak dan Lemak	236	9.6	9.4	0.5	4.8	4.7	<u>4.7</u>	5.0
5	Buah / Biji Berminyak	60	2.4	2.4	0.5	1.2	1.2	1.0	1.0
6	Kacang-kacangan	25	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	<u>2.0</u>	10.0
7	Gula	130	5.3	5.2	0.5	2.6	2.6	2.5	2.5
8	Sayur dan Buah	26	1.1	1.0	5.0	5.3	5.2	<u>5.2</u>	30.0
9	Lain-lain	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total		2460	100.0	98.4		72.3	712	63.9	100.0

2. Ketersediaan Pangan Lokal.

Berdasarkan NBM tahun 2004, ketersediaan pangan beras dan pangan lokal makanan berpati seperti pada tabel 4.

Tabel 4. Tingkat Ketersediaan Pangan Beras, Jagung dan Makanan Berpati di Maluku 2004

No.	Jenis Pangan	Ketersediaan (Ton)			Ketersediaan gr/kap/hari	Ketersediaan Energi Kkal/kap/hari
		Produksi	Impor	Total		
1	Beras	33.020	143.728	154.160*	319.67	1288
2	Jagung	12.477	-	12.477	22.69	72
3	Makanan Berpati :	149.463	-	149.463	127.92	412
	➤ Ubi Kayu	91.351	-	91.351	161.01	211
	➤ Ubi Jalar	15.298	-	15.298	27.92	35
	➤ Sagu	42.914	-	42.914	88.99	166

Sumber : Diolah dari NBM Maluku 2004; * telah dikurangi perubahan stok, beras tercecer dan kebutuhan benih.

Dari Tabel 4 jelas bahwa produksi beras di Maluku baru mencapai 21.5% dan impor sebesar 78.5%. Kalau pangan lokal mau berkontribusi maka perlu pengembangan pangan lokal ubi-ubian, jagung dan sagu. Potensi yang tersedia sekarang adalah sagu, karena pemanfaatan sagu baru 42.914 ton dari potensi produksi tersedia sebesar sekurang-kurangnya 112.000 ton, berarti yang belum dimanfaatkan 69.086 ton atau 62 %.

Selain itu dengan tidak melakukan impor beras berarti terjadi kehilangan persediaan protein 31.81 gr/kap/hari atau 39.4% persediaan protein yang dikonsumsi (lihat tabel 2). Pengembangan komoditas ubi-ubian, jagung dan sagu dapat mengganti ketersediaan protein dalam prosentase yang kecil oleh karena itu peningkatan persediaan protein hewani seperti ikan, daging, telur dan susu perlu mendapat perhatian.

Dari skor Pola Pangan Harapan (Tabel 3), terlihat juga persediaan sayur dan buah, kacang-kacangan, pangan hewani serta minyak dan lemak perlu mendapat perhatian karena skor PPHnya masih lebih kecil dari skor maksimum menyebabkan skor PPH tahun 2004 di Maluku baru mencapai 63.9 dari skor maksimum 100.

Potensi Pangan di Maluku.

Distribusi potensi pangan perlu diketahui sehingga dapat di ketahui potensi pangan andalan pada setiap wilayah. Dari tabel 5 terlihat bahwa ada komoditi-komoditi tertentu sebagai pangan andalan pada setiap kabupaten. Padi sawah dan kacang kedelai di Maluku Tengah, Buru dan SBB pada daerah transmigran sebagai komoditi yang baru di kembangkan di Maluku.

Komoditi lokal yang potensial pada suatu wilayah juga terlihat seperti: MTB adalah Padi Ladang, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan umbi-umbian; Maluku Tenggara adalah Ubi Kayu, Ubi jalar dan Umbi-umbian; Maluku Tengah adalah sagu, Ubi Kayu, Umbi-umbian; Kepulauan Aru adalah Sagu; SBB adalah Sagu, Ubi Kayu, Ubi Jalar; SBT adalah Sagu, Ubi Kayu dan Ubi Jalar.

3. Distribusi Pangan

Distribusi pangan di Maluku yang baru dikendalikan adalah beras melalui Dolog. Pangan lokal hanya merupakan konsumsi masyarakat. Malah dalam mengatasi kemiskinan Pemerintah Daerah masih tergantung pada kebijakan pemerintah Pusat yaitu dengan beras raskin, begitu pula pada daerah terkena bencana beras masih menjadi penyelamat situasi. Kondisi ini dapat dinilai wajar karena pengembangan pangan lokal belum terencana baik mulai dari budidayanya maupun penyimpanan dan distribusinya.

4. Konsumsi Pangan di Maluku

Sesuai data konsumsi 1993, 1996 dan 1999 untuk Maluku dan Maluku Utara maka terlihat konsumsi kalori perkotaan di dominasi oleh beras dan daerah pedesaan adalah beras dan ubi-ubian, serta konsumsi protein untuk daerah perkotaan adalah ikan, daging, telur dan susu tetapi untuk daerah pedesaan adalah ikan, daging, telur dan susu di dominasi oleh ikan. Belum tersedia data konsumsi pangan di Maluku secara baik, baik pangan beras maupun pangan lokal.

Tabel 5. Potensi Pangan Lokal Di Maluku

No.	Jenis Pangan	Kabupaten / Kota							
		MTB (Ton)	Maluku Tenggara (Ton)	Maluku Tengah (Ton)	Buru (Ton)	Kep. Aru (Ton)	SBB (Ton)	SBT (Ton)	Ambon (Ton)
1	Padi Sawah	-	-	<u>10.657</u>	<u>19.094</u>	-	<u>3.085</u>	-	-
2	Padi Ladang	<u>3.280</u>	70	559	137	316	41	-	-
3	Jagung	<u>10.258</u>	307	1.711	1.094	223	277	266	126
4	Ubi Kayu	<u>9.648</u>	<u>3.026</u>	<u>3.0472</u>	<u>36.729</u>	720	<u>9.050</u>	<u>4.314</u>	1.036
5	Ubi Jalar	<u>2.760</u>	<u>1.339</u>	<u>5.697</u>	<u>1.142</u>	335	<u>2.720</u>	<u>2.313</u>	396
6	Kacang Tanah	792	89	536	777	37	133	106	38
7	Kacang Hijau	135	14	190	5	12	54	36	-
8	Kacang Kedelai	-	-	<u>845</u>	<u>449</u>	-	<u>129</u>	-	-
9	Umbi-umbian	<u>5.879</u>	<u>3.296</u>	<u>3.366</u>	<u>2.614</u>	671	1410	754	-
10	Kacang-kacangan	110	72	44	49	13	24	10	-
11	Sagu (*)	931	760	<u>24.415</u>	<u>20.737</u>	<u>5.008</u>	<u>31.958</u>	<u>35.150</u>	855

Sumber : Diolah dari Maluku Dalam Angka 2005 – 2006; * Pendekatan produksi dari luas lahan sagu setiap Kabupaten / Kota dengan dasar jumlah pohon masak tebang / ha = 20, produksi per pohon 190 kg pati kering.

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL DI MALUKU

Uraian pada Bab terdahulu menunjukkan bahwa :

- Sudah tidak mungkin Indonesia mengharapkan berswasembada beras karna itu pangan lokal harus di kembangkan.
- Walaupun kesadaran ini sudah ada tetapi dalam kebijakan pengembangan pangan tingkat nasional, belum menyentuh pengembangan lokal.
- Maluku masih mengimpor 143.728 ton beras (78.5%) untuk memenuhi kebutuhan pangan propinsi.
- Kalau pangan lokal mau mengganti impor beras maka bukan saja perhatian pada aspek kalorinya tetapi juga pada aspek proteinnya karenapotensi beras sekarang (termasuk impor) mensuplai 31.81 gr/kap/hari atau 39.4% kebutuhan protein.
- Hal ini bisa terjadi karena potensi pangan lokal cukup tersedia walaupun terdistribusi tidak merata, oleh karena itu perlu diatur pengembangan pangan lokal berdasarkan pangan andalan di setiap wilayah
- Sesuai skor PPH propinsi maka selain perhatian terhadap pengembangan pangan lokal penghasil KH, maka perlu juga perhatian terhadap pangan yang belum mencapai skor PPH agar skor maksimum dari setiap pangan tersebut dapat dicapai.

Berdasarkan rangkuman butir a - f dan pemahaman terhadap sistem ketahanan pangan, berikut ini di sampaikan beberapa kebijakan pengembangan pangan lokal.

Kebijakan pengembangan lokal:

I. Aspek Koordinasi:

- Perlu adanya peraturan daerah (Perda) untuk menetapkan kontribusi pangan lokal dalam sistem ketahanan pangan daerah, agar menjadi pegangan bagi dinas terkait dalam kebijakan pengembangannya. Disisi lain perlu ada sikap yang jelas dari pemerintah daerah bahwa pengembangan padi sawah hanya melalui program intensifikasi.
- Perlu adanya Perda tentang perlindungan areal sagu, karena sagu merupakan pangan lokal yang sudah tersedia maupun peranan sagu bagi kelestarian lingkungan.
- Meningkatkan koordinasi di antara instansi / pihak yang menangani pangan.
- Menetapkan presentase peranan masing-masing komoditi pangan lokal untuk menggantikan beras agar dapat ditetapkan luas areal pengembangan setiap komoditas lokal untuk mencapai potensi produksi yang dikehendaki. Contoh : Kalau sagu mengambil peranan 15% maka dengan tingkat

produksi sekarang dan panen setiap 3 tahun maka dibutuhkan luas areal 34.310 ha (Andriko Notosusanto, 2006). Kalau potensi yang ada sekarang 30.000 ha belum mencukupi maka harus ada usaha peningkatan produksi apakah melalui ekstensifikasi atau intensifikasi.

2. Aspek Ketersediaan :

- a. Melakukan inventarisasi dan identifikasi potensi pangan lokal dan plasmanuftah di masing-masing daerah kabupaten / kota.
- b. Perlu perwilayahan komoditi pangan lokal sesuai potensi sekarang atau hasil inventarisasi dan agroekosistem wilayah. Perwilayahannya bisa sesuai batas kabupaten / kota atau batas gugus pulau maupun dibuat pembagian wilayah pangan yang baru.
- c. Reklamasi lahan sagu dari bentuk hutan menjadi kebun sagu dengan tujuan : (1) produksi per pohon dan jumlah pohon masak tebang per hektar akan meningkat (2) dapat dikembangkan usaha diversifikasi tanaman dengan tanaman pangan lain pada areal antara jalur sagu.
- d. Peningkatan teknologi budidaya komoditas pangan lokal dengan bantuan modal, peralatan maupun pendampingan, sedapat mungkin mengembangkan teknologi lokal yang sudah ada.
- e. Pengembangan keragaman pangan lokal sesuai hasil penelitian tingkat gizi pangan lokal yang ada pada suatu wilayah agar tercapai ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya serta aman, merata dan terjangkau.

3. Aspek Distribusi :

- a. Pendirian lumbung pangan per wilayah.
- b. Meningkatkan pembinaan terhadap lembaga-lembaga pemasaran pangan lokal.
- c. Menumbuhkan pola kemitraan antara pengusaha dan petani.
- d. Menentukan daerah-daerah yang membutuhkan suplai pangan secara reguler maupun bantuan mendesak ke daerah kelaparan atau bencana alam.

4. Aspek Konsumsi :

- a. Mensosialisasikan dan mengkampanyekan konsumsi pangan lokal khususnya sagu dan umbi-umbian.
- b. Meneliti tingkat gizi keragaman pangan lokal.
- c. Memodifikasikan pemberian raskin dengan komoditi sagu dan ubi-ubian.
- d. Meningkatkan industri pengolahan pangan sehingga dapat mewujudkan kondisi masyarakat yang kondusif dalam penganekaragaman konsumsi sagu dan ubi-ubian.
- e. Melakukan diversifikasi Vertikal dengan menumbuhkan industri rumah tangga pengolahan aneka kue sagu dan ubi-ubian dengan penguatan zat gizi.
- f. Melakukan gerakan penganekaragaman pangan lokal antara lain menyiapkan hidangan yang bahannya dari sagu dan ubi-ubian pada saat pertemuan formal maupun non formal atau melalui lomba cipta menu sagu dan ubi-ubian dengan melibatkan PKK dan kelompok masyarakat lainnya.
- g. Meningkatkan pemanfaatan pangan protein seperti daging, telur dan susu terutama ikan untuk mencapai kebutuhan konsumsi protein per hari (gr/kapita/hari).
- h. Pemanfaatan pekarangan atau lahan sekitar untuk meningkatkan produksi sayur dan buah-buahan, serta kacang-kacangan demi meningkatkan keragaman pangan rumah tangga.

5. Aspek Pemberdayaan Masyarakat :

- a. Memberikan bantuan permodalan dan teknologi tepat guna kepada petani guna meningkatkan pengolahan pangan lokal sesuai potensi jenis pangan wilayah.
- b. Mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan penyuluhan pertanian serta pendampingan dalam rangka alih teknologi kepada petani.
- c. Memberikan penghargaan bagi petani yang mengembangkan dan melestarikan pangan lokal.

PENUTUP

Demikianlah beberapa pokok pikiran apabila Pangan Lokal akan memberikan kontribusi yang nyata bagi sistem Ketahanan Pangan Nasional. Disadari bahwa pokok pikiran ini jauh dari sempurna, tetapi melalui seminar ini dapat dilengkapi agar dapat bermanfaat dalam usaha pemantapan sistem Ketahanan Pangan Nasional.

PUSTAKA

- Annonymous, 2004. Hasil Konferensi Dewan Ketahanan Pangan 2004. Sekretariat DKP. Jakarta, 2004.
- Annonymous, 2005. Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan Propinsi Maluku 2004. Dinas Pertanian propinsi Maluku.
- Annonymous, 2006. Kebijakan Ketahanan Pangan 2006 2009. Dewan Ketahanan Pangan Jakarta, 2006.
- Annonymous, 2006. Maluku Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Propinsi Maluku, 2006.
- Annonymous, 2006. Pemberdayaan Ketahanan Pangan Masyarakat. Workshop Penguatan Kelembagaan DKP 10 Agustus 2006. Diputi Bidang Produksi Kementrian Negara Koperasi dan UKM. Jakarta, 2006.
- Louhenapessy, J. E., 2006. Potensi Dan Pengolahan Sagu Di Maluku. Prosiding Lokakarya Sagu Dalam Revitalisasi Pertanian Maluku. BPFP UNPATTI, Ambon, 2006.
- Susanto, A.N., 2006. Potensi Dan Perhitungan Luas Lahan sagu Untuk Perencanaan Ketahanan Pangan Spesifik Lokasi Di Propinsi Maluku. Prosiding Lokakarya Sagu Dalam Revitalisasi Pertanian Maluku. BPFP UNPATTI, Ambon, 2006.
- Saragih. R. A. dan J. Vokames, 2004. Pangan Spesifik Lokal Sebagai Basis Ketahanan Pangan Masyarakat Kabupaten Jayapura. Prosiding Lokakarya Nasional Pendayagunaan Pangan Spesifik Lokal Papua. UNIPA, 2004.